

**ANALISIS EKSPOR DAN IMPOR LIMBAH PADAT ANTARA CINA DAN AMERIKA
SERIKAT: *OPERATION GREEN FENCE* (2013) DAN *OPERATION NATIONAL
SWORD* (2018)**

**ANALYSIS OF SOLID WASTE EXPORT AND IMPORT BETWEEN CHINA AND
THE UNITED STATES: *OPERATION GREEN FENCE* (2013) DAN *OPERATION
NATIONAL SWORD* (2019)**

Meilisa Setyani
Universitas Pelita Harapan, Tangerang
Email: meilisasetyani_mei@rocketmail.com

ABSTRACT

China is a country that is famous for its rapid economic growth which was influenced by the purchase of solid waste from neighboring countries. The act of purchasing solid waste from neighboring countries was conducted in order to support industrial and manufacturing activities in the country. However, over the years the purchase of solid waste has caused many losses to Chinese countries. China then enforces the Operation Green Fence (OGF) and Operation National Sword (ONS) policies. In that case, this study was done to answer any factor that caused China to enforce both policies, as well as the economic impact that resulted from the policy. The study uses qualitative approaches, case study methods, and literature study techniques to analyze the data obtained. The results of this research shows that environmental factors are the main factors that bring out other factors such as health, as well as domestic and foreign pressures. The impacts resulted from both policies also affects the economy not only between China and the United States of America, but also internationally. The number of demand and supply of solid waste around the world, particularly in China and United States is affected, as the policy imposed is a policy to restrict the import of solid waste done by China.

Keywords: Operation Green Fence, Operation National Sword, environmental pollution, China

ABSTRAK

Cina adalah negara yang terkenal dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, yang dipengaruhi oleh pembelian limbah padat dari negara tetangga. Tindakan pembelian limbah padat dari negara tetangga dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan industri dan manufaktur di negeri ini. Namun, selama bertahun-tahun pembelian limbah padat telah menyebabkan banyak kerugian bagi negara-negara Cina. Cina kemudian memberlakukan kebijakan *Operation Green Fence* (OGF) dan *Operation National Sword* (ONS). Dalam hal ini, penulisan artikel ini dilakukan untuk menjawab faktor apa yang menyebabkan Cina memberlakukan kedua kebijakan tersebut, serta dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus, dan teknik studi literature untuk menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan adalah faktor utama yang membawa keliar faktor lain seperti kesehatan, serta adanya tekanan dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak yang dihasilkan dari kedua kebijakan ini mempengaruhi perekonomian yang tidak hanya di antara Cina ataupun Amerika Serikat, tetapi juga internasional. Jumlah permintaan dan penawaran atas limbah padat di seluruh dunia, khususnya di Cina dan Amerika Serikat terpengaruh, mengingat kebijakan yang diberlakukan adalah kebijakan untuk membatasi impor limbah padat yang dilakukan oleh Cina.

Keywords: *Operation Green Fence*, *Operation National Sword*, pencemaran lingkungan, Cina

1. Pendahuluan

Cina merupakan negara yang terkenal dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan warga

negaranya sangatlah terbatas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negaranya yang terbatas tersebut, pada tahun 1980-an, Cina mulai memberikan izin kepada perusahaan-perusahaannya untuk mengimpor limbah

padat dari negara lain. Usaha industri daur ulang limbah khususnya plastik yang digeluti banyak perusahaan di Cina pernah menjadi bisnis yang cukup menguntungkan bagi Cina karena pada dasarnya limbah plastik tersebut dijual kembali setelah didaur ulang dengan harga yang tinggi (Purwaningrum, 2018). Terlebih lagi harga limbah plastik yang dibeli dari luar negeri harganya jauh lebih murah dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan limbah plastik di dalam negeri.

Permasalahan pun berlanjut dimana semakin berkembangnya zaman, dunia *fashion* semakin berkembang ke tingkat yang membuat polusi limbah semakin parah. Bahan-bahan dari baju, celana ataupun sepatu bukan lagi terbuat dari benang, kain, maupun kulit melainkan bahan sintesis, yang semakin sulit untuk didaur ulang. Sehingga pemrosesan bahan-bahan ini akan memakan waktu dan juga biaya yang besar.

Tujuan mendaur ulang adalah untuk menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai agar dapat mengurangi polusi ataupun limbah yang ada. Namun, tidak semua limbah padat dapat didaur ulang. Limbah yang diterima oleh Cina tidak dipilah dengan baik terlebih dahulu oleh pihak pengekspor. Hal ini menyebabkan seluruh macam limbah padat baik yang dapat didaur ulang maupun yang tidak dapat didaur ulang akan berakhir di Cina.

Limbah yang tidak dapat didaur ulang, cenderung harus dimusnahkan oleh Cina, dengan cara dibuang ke laut atau dibakar. Pemusnahan limbah ini berdampak serius pada lingkungan Cina. Penanganan limbah yang salah telah menjadikan Cina sebagai negara utama yang mencemarkan lingkungan di dunia (Sebayang, 2018). Pembakaran yang dilakukan di Cina pun telah menyelimuti udara di negaranya dengan asap beracun.

Menurut hasil studi *University of Georgia*, Cina menjadi negara dengan konsumen plastik terbesar di dunia. Tahun 2010, Cina diperkirakan menyumbang sebanyak 3,53 juta metrik ton sampah plastik

pertahunnya. Cina pun menjadi negara penyumbang limbah ke laut terbesar di dunia. Pencemaran yang terjadi pun dapat berdampak pada ekosistem laut karena limbah-limbah yang dibuang tersebut cenderung memiliki zat-zat beracun yang berbahaya bagi makhluk hidup di dalam laut (McCarthy, 2019).

Cina pun menilai permasalahan lingkungan ini menjadi isu yang penting untuk dicari solusinya. Cina telah menjadi “Tempat Pembuangan Sampah” selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Negara-negara yang paling banyak berkontribusi dalam pengiriman limbah ke Cina diantara lainnya adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa, dan Jepang.

Pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping pun membuat suatu kebijakan yang disebut sebagai *Operation Green Fence* (OGF), sebagai upaya pemerintah Cina bersama dengan pihak bea cukai untuk lebih ketat dalam memeriksa kontainer-kontainer yang masuk ke wilayah Cina melalui pelabuhan yang isinya adalah limbah asing.

Tahun 2017, Pemerintah Cina kembali membuat suatu rancangan kebijakan yang disebut sebagai *Operation National Sword* (ONS). Kebijakan ini memberikan larangan impor terhadap 24 kategori limbah padat yang mulai berlaku pada 2018. Cina pun memperluas kategori tersebut menjadi 32 kategori. Kategori tersebut diantara lainnya adalah plastik, kertas, tekstil, kayu, *stainless steel*, titanium, bagian mobil, serta perangkat keras berupa alat-alat elektrik dan elektronik.

Dari permasalahan yang telah diutarakan, penulis menemukan dua pertanyaan penelitian yang penulis jadikan sebagai acuan dalam penulisan artikel ini. Dua pertanyaan tersebut yakni: Faktor apa yang menyebabkan Cina merumuskan kebijakan *Operation Green Fence* dan *Operation National Sword* setelah bertahun-tahun menjadi negara importir limbah terbesar di dunia?, dan Bagaimana kebijakan ini berdampak bagi perekonomian yang

terkait dengan ekspor dan impor limbah padat di antara Cina dan Amerika Serikat?

Tinjauan Pustaka

Larangan Impor

Larangan impor yang diberlakukan oleh Cina, termasuk ke dalam salah satu tindakan yang berhubungan dengan perdagangan seperti kebijakan-kebijakan yang membatasi perdagangan, tarif, dan juga pembatasan transaksi keuangan yang terjadi di antara negara. Hal ini pun menjadi pengertian secara umum dari sanksi ekonomi. Menurut Smeets, tindakan seperti boikot dan embargo adalah salah satu tindakan yang termasuk sebagai larangan impor. Boikot merupakan suatu tindakan penolakan untuk membeli barang maupun jasa dari pihak yang menyuplai. Sedangkan embargo adalah pembatasan suplai barang dan jasa yang dilakukan oleh penyuplai ke pihak pembeli. Smeets pun menambahkan bahwa sanksi ekonomi penerapannya lebih diarahkan untuk kepentingan politik suatu negara (Smeets, 2018).

Drezner dalam studinya, menambahkan bahwa negara yang diberikan sanksi dapat mengalihkan ekspornya ke negara lain atau yang disebut sebagai negara ketiga dan kemudian memotong kontrol dari pihak bea cukai (Drezner, 2000).

Namun studi yang dilakukan oleh Smeets maupun Drezner tidak sama dengan studi yang dilakukan oleh penulis. Meskipun larangan impor yang diberlakukan oleh Cina masih termasuk dalam ruang lingkup sanksi ekonomi berupa boikot, terdapat perbedaan-perbedaan yang membedakan studi yang dilakukan Smeets dan Drezner dengan studi yang dilakukan oleh penulis. Larangan impor yang diberlakukan oleh Cina bukan ditujukan untuk kepentingan politik seperti yang dinyatakan oleh Smeets. Larangan impor yang diberlakukan oleh Cina ditujukan untuk kepentingan yang menyangkut lingkungan hidup dan kelangsungan hidup dari rakyat negara Cina.

Hal ini pun sesuai dengan arti dari kata sanksi yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam

KBBI, sanksi berarti sebuah tangguhan atau tindakan atau hukuman kepada perseorangan atau negara yang tujuannya adalah untuk memaksa pihak yang dituju untuk menaati ketentuan-ketentuan tertentu. Namun, sifat dari larangan impor yang diberlakukan oleh Cina bukanlah suatu hukuman. Mengingat kebijakan larangan impor yang diberlakukan oleh Cina berfokus kepada kepentingan lingkungan hidup di dalam negerinya.

Selain sifatnya yang bukan berupa hukuman, kebijakan larangan impor oleh Cina juga bersifat non diskriminatif. Hal ini sesuai dengan aturan dalam *World Trade Organization* (WTO), dalam buku berjudul *Sekilas WTO* yang ditulis oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam buku dijelaskan bahwa negara yang saling melakukan perdagangan, apabila ada salah satu pihak yang merasa yakin bahwa tindakan dagang yang dilakukan negara lain tersebut telah merusak lingkungannya, maka negara yang lingkungannya rusak tersebut dapat melakukan tindakan untuk melindungi lingkungannya. Namun negara tersebut tidak boleh melakukan diskriminasi, sehingga seluruh tindakan atau ketentuan yang diterapkan atas impor dari suatu negara harus juga diterapkan pada negara lainnya.

Hal ini pun yang sekaligus menyangkal pernyataan yang dinyatakan oleh Drezner. Cara memotong kontrol dari bea cukai dengan mengalihkan limbah ke negara ketiga untuk dikirim ke Cina tidak dapat dilakukan sesuai dengan pernyataan oleh Drezner. Mengingat kebijakan yang diterapkan oleh Cina merupakan kebijakan non diskriminatif yang berarti kebijakan ini tidak hanya berlaku pada negara tertentu, namun terhadap seluruh negara.

Dampak Larangan Impor Terhadap Perekonomian

Ying dalam jurnalnya meyakini bahwa negara-negara maju khususnya yang terkena dampak dari kebijakan larangan impor oleh Cina telah melakukan upaya-upaya dalam mengurangi limbah

domestiknya. Namun cara yang dinilai lebih efisien untuk menggantikan posisi Cina sebagai importir adalah dengan cara mencari negara lain. Mengingat untuk membangun industri daur ulang yang baru akan memakan waktu dan juga biaya yang besar. Ying pun menambahkan bahwa setelah kebijakan OGF dan ONS berlaku, banyak pengiriman limbah padat yang beralih ke negara-negara yang ada di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara dan India (Ying, 2019).

Ying pun dalam studinya mengutip Workman dan Vejpongsa yang menyatakan bahwa Indonesia sejak April 2018 telah melakukan 100% inspeksi terhadap limbah kertas dan plastik yang masuk ke wilayah Indonesia. Thailand pun juga menyatakan bahwa negaranya menerapkan larangan impor sementara terhadap limbah plastik. Malaysia pada Oktober 2018 pun ikut membatasi masuknya limbah plastik dengan cara menerapkan pajak impor atas komoditas tersebut.

Dalam studinya, Ying tidak menyebutkan dampak ekonomi apa yang dihasilkan dari kebijakan larangan impor limbah padat oleh Cina, serta dampak ekonomi apa yang dapat diperoleh bagi negara-negara yang menerima pengalihan limbah dari negara-negara maju.

Dalam skripsi milik Sanubari, Sanubari menyimpulkan bahwa terjadinya perang dagang antara Cina dan AS dipicu oleh diberlakukannya kebijakan larangan impor limbah padat oleh Cina pada tahun 2018 (Sanubari, 2019).

Sanubari berargumen bahwa Presiden AS, Donald Trump memberikan kebijakan tarif kepada Cina karena AS merasa telah mengalami kerugian ekonomi setelah Cina memberlakukan kebijakan larangan impor. Sanubari pun juga menambahkan kutipan data yang diperolehnya dari *US-China Economic and Security Review Commission* (USCC) bahwa Cina tidak hanya merugikan beberapa pihak namun telah berdampak pada industri lokal dan juga setidaknya sebanyak 40.000 pekerja terancam kehilangan mata pencahariannya.

Sanubari pun menyimpulkan bahwa Trump memberlakukan kebijakan tarif untuk melindungi pekerja lokal di AS, serta menutup kerugian yang diterima oleh AS sehingga perdagangan yang terjadi di antara AS dan Cina tetap menguntungkan.

Namun, hal ini bertentangan dengan pendapat penulis yang melihat bahwa perang dagang yang terjadi antara Cina dan AS bukan dipicu oleh kebijakan larangan impor oleh Cina. Sebelum Trump menjabat jadi Presiden AS, Trump sudah menunjukkan sentimennya terhadap negara Cina karena Cina telah merebut identitas AS sebagai negara dengan perekonomian terbesar. Trump pun telah melayangkan beberapa tuduhan terhadap Cina semenjak Trump melakukan kampanye untuk menduduki jabatan sebagai Presiden AS.

Menteri Luar Negeri Cina pun menyatakan bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh Cina merupakan kebijakan non diskriminatif yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di negara Cina (Xinhua, 2018). Hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan larangan impor oleh Cina tidak ditujukan khusus kepada AS ataupun dengan tujuan untuk merugikan negara manapun sehingga kebijakan larangan impor oleh Cina bukan menjadi pemicu terjadinya perang dagang antara Cina dan AS.

Dampak Larangan Impor Terhadap Industri Daur Ulang

Cina yang sejak lama telah memulai proses industrialisasi, membutuhkan banyak sekali bahan baku dengan harga yang murah dan dengan kualitas yang baik. Kebutuhan tersebut menyebabkan banyak warga negara di Cina beralih profesi menjadi pengumpul sampah. Pengumpul sampah ini disebut sebagai para pekerja di sektor informal industri daur ulang. Pekerja-pekerja ini menggunakan alat atau teknologi yang masih sangat tradisional dalam rangka memilah atau mendaur ulang berbagai jenis limbah.

Karlsen dalam *thesis*-nya menyatakan bahwa pada tahun 2014,

setidaknya ada sekitar 3,3 juta – 5,6 juta orang di Cina termasuk dalam sektor informal. Hal ini dikarenakan profesi pengumpul sampah yang dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari pekerjaanya (Karlsen, 2019).

Pada *thesis* milik Edwards yang berfokus pada daur ulang limbah elektronik dan elektrik, dinyatakan bahwa sektor informal mendapatkan keuntungan yang besar saat menjual sampah elektronik ke pendaur ulang dibandingkan menjualnya secara utuh ke pasar barang bekas (Edwards, 2016).

Berbeda dengan Velis yang dikutip dalam jurnal milik Ying. Velis yang berfokus pada bidang kesehatan menyatakan bahwa hampir seluruh ruang kerja industri daur ulang yang berada di sektor informal tidak terdaftar dalam Pemerintahan Cina. Biaya operasi dalam sektor informal ini pun sangat rendah dengan fasilitas maupun regulasi kesehatan dan keselamatan yang sangat minim.

Namun untuk membedakan studi yang dilakukan penulis dengan studi-studi ini adalah tidak ada studi yang menjelaskan dampak kebijakan larangan impor limbah padat terhadap para pekerja di industri daur ulang di Cina. Karlsen membahas secara umum sektor informal industri daur ulang yang ada di Cina. Sedangkan Velis tidak menjabarkan dengan jelas dampak yang dapat diperoleh apabila ruang kerja dari sektor informal ini tidak memiliki fasilitas kesehatan ataupun regulasi kesehatan yang sesuai. Selain itu, Edwards pun dalam *thesis*-nya hanya membahas ketenagakerjaan dari segi industri daur ulang limbah elektronik dan elektrik.

Konstruktivisme

Konstruktivisme atau dalam Bahasa Inggris *constructivism* berasal dari kata “*construct*” yang berarti “konstruksi”. Hubungan Internasional termasuk sebagai dunia sosial yang merupakan bentuk dari konstruksi manusia. Hubungan internasional

diperoleh dari adanya interaksi sosial antar negara yang didasari oleh adanya pemahaman bersama atau *intersubjective understandings*. Kepentingan dari negara dapat dihasilkan setelah identitas dari negara terlihat melalui tercapainya pemahaman bersama. Kepentingan ini yang menjadi dasar dari kebijakan atau tindakan selanjutnya yang diambil oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan identitasnya.

Penggunaan Teori Konstruktivisme ini dinilai tepat sebagai panduan penulis dalam menulis artikel ini. Hal ini dikarenakan adanya dua alasan. Alasan yang pertama dikarenakan adanya perjanjian internasional di bidang lingkungan yang di mana Cina merupakan salah satu anggotanya, namun tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota. Kedua, yaitu karena adanya pandangan negatif dari dunia internasional atas kondisi lingkungan di Cina melalui beberapa film dokumenter yang dipicu oleh adanya pandangan negatif dari rakyatnya sendiri terhadap pemerintahnya yang dinilai tidak peduli atas pentingnya lingkungan hidup di Cina. Kedua alasan tersebut pun telah menyebabkan identitas Cina yang dikenal kurang baik di dunia internasional.

Dalam rangka adanya kepentingan untuk mengembalikan identitas baik Cina, Presiden Xi Jinping merumuskan suatu kebijakan untuk membatasi impor limbah padat. Hal ini dinilai dapat membuat dunia internasional melihat Cina serius dalam menanggulangi masalah lingkungannya. Cara ini pun diharapkan dapat memperbaiki identitas Cina yang dinilai sangat penting oleh Presiden Xi Jinping.

Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan jenis data yang didapat oleh penulis. Jenis data tersebut yaitu *soft data* yang sifatnya tidak dapat diukur karena merupakan data yang didapat melalui opini individu. Data ini dikumpulkan dari

beberapa pendapat para ahli, hasil riset perbandingan, serta beberapa teori.

Penulis pun kemudian menggunakan metode studi kasus dalam rangka mempelajari latar belakang masalah dari isu yang penulis pilih. Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi penyebab dan pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi yaitu diberlakukannya larangan impor limbah padat yang diberlakukan oleh Cina.

Data-data pun penulis kumpulkan dengan teknik studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh berupa data sekunder. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan juga berita menjadi beberapa contoh data sekunder. Data dari teknik pengumpulan ini pun dapat berbentuk fisik maupun daring yang dapat diperoleh dari perpustakaan ataupun secara *online*.

Setelah diperoleh, data yang telah terkumpul penulis analisis dengan cara dikategorikan berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi seperti faktor-faktor penyebab diterapkannya kebijakan tersebut. Faktor-faktor seperti kesehatan, lingkungan, ataupun faktor-faktor lainnya.

Selain itu penulis juga membandingkan data statistik seperti tingkat pencemaran, jumlah ekspor dan impor limbah padat yang terjadi antara Cina dan AS ataupun negara lainnya sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Data-data tersebut disajikan dengan ilustrasi beserta uraian singkat yang menjelaskan isi dari data tersebut. Penyajian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menarik kesimpulan, sehingga penulis dapat menjawab rumusan masalah yang muncul dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami bagi para pembaca.

Analisis

Faktor Penyebab Perumusan Kebijakan Larangan Impor Limbah Padat oleh Cina

Kebijakan larangan impor limbah padat yaitu OGF diberlakukan oleh Cina karena adanya kesepahaman bersama untuk mengembalikan standar kualitas limbah

padat yang masuk ke wilayah negara Cina. Kebijakan ini memperbolehkan tingkat kontaminasi sebesar 1,5% (Katharine, 2013). Sedangkan kebijakan ONS, menurut *Resource Recycling* pada tahun 2018, Cina memberi larangan terhadap 24 jenis limbah padat yang kemudian di tambah menjadi 32 jenis. Pemerintah Cina juga memperbolehkan tingkat kontaminasi hanya sebesar 0.3%. Pemerintah Cina pun bekerja sama dengan pihak bea cukai dalam melakukan inspeksi ketat terhadap seluruh kontainer.

Pemberlakuan kebijakan ini sejalan dengan pernyataan dari Presiden Xi Jinping yang menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengorbankan kepentingan lingkungannya untuk keperluan pertumbuhan ekonomi yang bersifat sementara. Hal ini pun berkaitan dengan seiring berjalannya waktu, kualitas dari limbah padat yang diterima oleh Cina semakin menurun. Limbah-limbah tersebut telah terkontaminasi dengan limbah lainnya yang tidak dapat didaur ulang. Industri-industri di Cina pada akhirnya harus membuang limbah yang tidak dapat didaur ulang tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau dibakar yang kemudian akan dibutuhkan biaya lebih (Flower, 2016).

Proses pembuangan inilah yang kemudian berdampak bagi lingkungan di Cina. Berbagai pencemaran yang dihasilkan dinilai telah berkontribusi atas rusaknya lingkungan di Cina, sekaligus menjadi penyebab banyaknya rakyat Cina terpapar penyakit dan juga banyaknya kematian (Zhou, et. al., 2019).

Faktor Lingkungan dan Kesehatan

Salah satu faktor yang menyebabkan Cina memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padat adalah faktor lingkungan yang berkaitan dengan faktor kesehatan. Pencemaran udara, tanah, dan air yang terjadi di Cina yang dihasilkan oleh aktivitas mendaur ulang limbah padat telah merusak lingkungan dan mengancam kesehatan dari penduduknya.

Metode pembuangan ke TPA, menjadi metode yang paling populer karena biaya yang cukup murah dan juga tidak memakan banyak waktu. Namun pembuangan menggunakan metode ini memakan banyak tempat serta dapat menyebabkan kontaminasi pada tanah karena limbah yang tidak dipilah terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya. Limbah sehari-hari seperti makanan sisa, pembungkus makanan, alat tulis, limbah rumah sakit, bahkan alat-alat elektronik yang mengandung kandungan kimia berbahaya dibuang bersamaan ke dalam tumpukan yang sama. Kontaminasi yang dihasilkan dari metode ini setelah mengontaminasi tanah, dapat menguap ke udara dan mencemari air.

Selain menggunakan metode pembuangan ke TPA, menurut Rinkesh, penggunaan insinerator juga populer digunakan karena dinilai sangat efisien bahkan bisa mengurangi volume sampah hingga 30% dari volume awalnya. Sampah yang ada di Cina setiap harinya bisa menumpuk sebanyak 520 ribu ton. Namun penggunaan insinerator tidaklah ramah lingkungan karena dapat menghasilkan emisi yang berbahaya. Meskipun beberapa insinerator di Cina dapat menghasilkan emisi yang rendah di bawah standar yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Insinerator tersebut kebanyakan dibiayai, dibangun, dan dijalankan oleh Pemerintah Cina. Sedangkan kebanyakan insinerator yang tidak dibiayai oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat menghasilkan emisi yang rendah karena mahalnya sistem filtrasi yang canggih. Hal ini yang menyebabkan emisi yang dihasilkan dinilai sangat berkontribusi atas polusi udara di Cina.

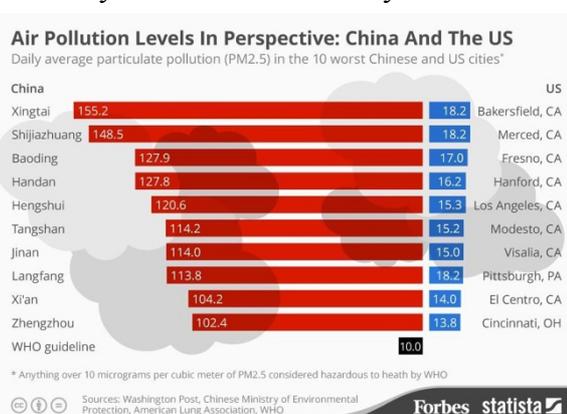
Particulate Matter (PM), menurut *World Health Organization* (WHO) adalah sebuah indikator yang paling umum digunakan untuk melihat tingkat polusi udara. Partikel udara dengan diameter 2,5 mikron atau kurang bisa masuk ke dalam paru-paru dan bahkan dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah karena sifat

partikelnya yang lebih halus atau yang disebut sebagai *fine particulate matter*.

WHO menambahkan bahwa batasan partikel udara dengan diameter 2,5 mikron atau kurang dari 2,5 mikron yang disebut sebagai PM 2,5 adalah sebesar 10 mikrogram per meter kubiknya. Sehingga jika melewati batasan tersebut, maka kualitas udara dinilai berbahaya bagi kesehatan manusia. Tereksposnya diri terhadap partikel-partikel ini dapat mengakibatkan adanya penyakit Gambar 4.1 Polusi Udara di Cina dan AS. Forbes saluran pernapasan dan bahkan dapat menyebabkan kanker paru-paru.

Pada gambar 4.1, terlihat perbandingan kualitas udara yang ada di Cina dan AS berdasarkan jumlah konsentrasi PM 2,5 dari sepuluh kota paling tercemar di Cina dan di AS. Di Cina, kota yang paling tercemar menyentuh angka 155,2 mikrogram

per meter kubik, sedangkan di AS kota yang paling tercemarnya hanya menyentuh angka 35 mikrogram per kubiknya. Menurut McCarthy dalam Forbes



(2015) tujuh dari sepuluh kota tersebut berada di Provinsi Hebei yang terkenal sebagai pusat perindustrian yang termasuk di dalamnya industri daur ulang. Industri ini yang kemudian menjadi kontributor atas pencemaran di Cina karena maraknya penggunaan metode pembakaran sampah untuk memusnahkan sampah yang tidak dapat didaur ulang.

Berbagai bau dan asap yang dihasilkan dari proses pembakaran khususnya pembakaran plastik sudah menjadi “konsumsi” setiap hari bagi pada

penduduk di Hebei yang dekat dengan Beijing. Bau dan asap dari pembakaran ini menghasilkan zat beracun yang berbahaya yang dapat menyebabkan penghirupnya mengalami batuk, hilang ingatan, dan bahkan kanker (Li dan Jianqing, 2019).

McCarthy dalam Forbes (2018) menambahkan bahwa sebanyak 1,58 juta orang di Cina telah meninggal pada tahun 2016 yang disebabkan oleh kualitas udara yang berbahaya. Hal ini pun disebabkan oleh penyakit yang ditimbulkan dari kualitas udara tersebut seperti penyakit gangguan pernapasan dan kanker paru-paru (McCarthy, 2019).

Tidak hanya polusi udara, namun pencemaran lainnya seperti pencemaran tanah pun marak terjadi di Cina. Pembuangan limbah secara ilegal mencemari tanah di Cina dan merugikan penduduknya yang bergantung pada tanah seperti ladang pertanian.

Kontaminan seperti timbal, arsenik, dan petroleum adalah beberapa contoh kontaminan yang ada di dalam tanah yang tercemar. Tidak hanya tanah yang harus terpapar langsung untuk bisa tercemar. Tanah yang tidak terpapar langsung pun juga dapat terkontaminasi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya seperti terbawa melalui udara dan juga air hujan. Hasil pertanian yang tumbuh dari tanah yang tercemar memiliki kemungkinan tinggi untuk mengandung kontaminan. Hasil pertanian yang tidak dicuci dengan baik pun dapat meninggalkan tanah yang terkontaminasi. Hasil pertanian tersebut jika dikonsumsi sangatlah memberi resiko yang tinggi bagi kesehatan konsumennya (Soil Science Society of America).

Data survei yang dilakukan oleh *Ministry of Environmental Protection* (MEP) dan *Ministry of Land Resources* (MLR) yang dikutip oleh Takahashi dalam studinya (Takahashi, 2016) menyatakan bahwa ada delapan kategori logam berat yang ada di dalam tanah yang terkontaminasi. Kontaminan tersebut yaitu kadmium, merkuri, arsenik, tembaga, timbal, kromium,

seng, dan juga nikel. Hasil survei yang dilakukan menyatakan bahwa sebesar 16,1% total tanah melewati batas standar polusi terhadap tanah.

Takahashi pun menambahkan data dari *2013 Environmental Statistical Annual Report* milik MEP yang menyatakan bahwa limbah industri di Cina pada tahun 2013, menyentuh angka 3,28 milyar ton, namun sebesar 430 milyar ton dibuang tanpa diolah terlebih dahulu (Takahashi, 2016).

Selain pencemaran udara dan tanah, pencemaran air juga menjadi salah satu pencemaran yang merupakan salah satu faktor lingkungan yang menyebabkan Cina memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padat. Mengingat adanya kepentingan Cina dalam memperbaiki identitasnya yang dinilai tidak baik dan tidak sesuai dengan kepentingan awal Pemerintah Cina untuk membangun negaranya menjadi negara yang sukses. Identitas Cina, terkenal sebagai pelaku pencemaran air terbesar di dunia. Pernyataan ini pun didukung oleh pernyataan dari Mohan dalam *Los Angeles Times*. Mohan menyatakan bahwa Cina menjadi kontributor utama atas limbah yang ada di laut. Mohan mengutip jurnal *Science* yang mengestimasi bahwa Cina menyumbang 1,3 milyar hingga 3,5 milyar metrik ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya (Mohan, 2015).

Christou dalam Verdict (Christou, 2018) mengutip data milik Pemerintah Cina yang menyatakan bahwa pada 2012, 57,3% air yang ada di Cina sangat tercemar hingga tidak dapat dikonsumsi. Bahkan pada tahun 2014 suplai air tanah di lebih dari 60% kota yang ada di Cina dikategorikan sebagai air yang “buruk hingga sangat buruk”. Sedangkan lebih dari seperempat sungai utama di Cina disebut sebagai air yang “tidak layak untuk disentuh oleh manusia”.

Hal ini pun diperburuk dengan kurangnya infrastruktur atau fasilitas dalam mengolah sampah ataupun mengangkut sampah (Albert dan Xu, 2016). Bank Dunia, dalam artikelnya yang berjudul “*China: Keeping the Water and Environment Clean*

in the Qiantang River Basin” menyatakan bahwa kota-kota yang ada di Cina khususnya kota-kota besar selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan infrastruktur pengolahan air dengan tujuan agar air di Cina layak untuk dikonsumsi. Sedangkan bagi kota kecil seperti salah satunya Provinsi Zhejiang masih bergantung dengan air sungai atau danau. Namun suplai air sungai yang aman hanya sebesar 29% padahal sebagai sungai utama, sungai tersebut digunakan sebagian besar 15 juta orang yang tinggal di provinsi tersebut. Hal ini dikarenakan limbah cair maupun padat dibuang langsung ke dalam sungai tanpa diolah terlebih dahulu.

Meskipun pencemaran tersebut diketahui oleh para penduduknya, namun penggunaan air pun tetap dilakukan karena air merupakan kebutuhan yang penting dalam kesehariannya. Baik untuk diminum, bahan memasak, mandi, ataupun mencuci. Mengonsumsi air sungai yang tercemar ini pun mengancam kesehatan dari yang mengonsumsinya dengan penyakit seperti diare, kolera, disentri, dan bahkan kematian.

Tidak hanya di Provinsi Zhejiang, penduduk di kota Guiyu pun juga terancam akan penyakit-penyakit yang dihasilkan dari mengonsumsi air tercemar. Kota Guiyu, terkenal sebagai pusat daur ulang limbah elektronik dan elektrik terbesar di Cina. Air sungainya setelah diukur mengandung zat berbahaya seperti kadmium, nikel, dan tembaga dengan level yang melewati batas ketentuan yang diberikan oleh *Environmental Protection Agency* yaitu sebesar 700% (Williams, 2008).

Penduduk di kota Guiyu khususnya anak-anak disebutkan memiliki kadar timbal yang tinggi dalam peredaran darahnya. Levelnya beragam dari 4.4 µg/dL hingga 33 µg/dL (mikrogram per desiliter). Sebesar 80% anak kadar timbalnya melampaui level 10 µg/dL (Huo et. al., 2007). Wheeler (2013) yang mengutip *The U.S Center for Disease Control and Prevention*, pun menyatakan bahwa dengan level timbal 5 µg/dL dalam

darah saja sudah dianggap berbahaya bagi kesehatan dan dibutuhkan perhatian khusus.

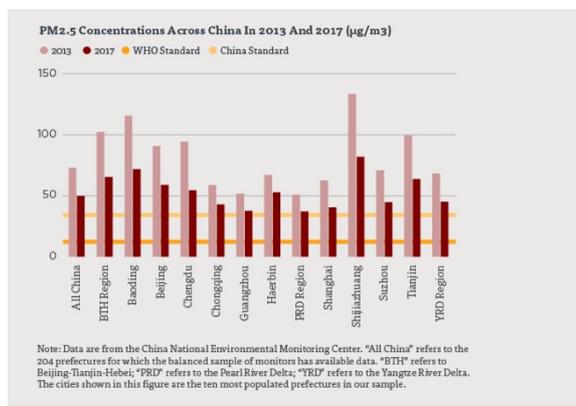
Adanya kepentingan bagi Pemerintah Cina dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang rusak, merupakan tujuan dari Pemerintah Cina dalam merumuskan kebijakan larangan impor limbah padat. Pada gambar 4.2, terlihat bahwa Pemerintah Cina telah memenangkan perangnya dengan pencemaran yang ada di negaranya. Hal ini terlihat dari adanya perkembangan pada kualitas udara di seluruh kawasan di Cina sampai dengan akhir tahun 2017, dibandingkan dengan kualitas udara di Cina pada tahun 2013.

Hal ini pun dikarenakan adanya kebijakan OGF pada tahun 2013, dengan jangka waktu tertentu, serta dikarenakan dirumuskannya kebijakan ONS sejak 2017 meskipun pembatasannya masih dengan

Gambar 4.2

<https://epic.uchicago.edu/news/top-10-charts-of-2018/>

tingkat kontaminasi yang berbeda dengan



saat diberlakukannya kebijakan ONS pada tahun 2018. Perkembangan yang terjadi pun salah satunya terlihat pada kawasan BTH yaitu Beijing, Tianjin, dan Hebei yang kotanya memiliki populasi serta industri paling banyak, yang termasuk di dalamnya industri daur ulang limbah padat.

Namun perkembangan kualitas udara yang terjadi sebenarnya tidak murni dihasilkan dari kebijakan larangan impor limbah padat. Mengingat adanya kepentingan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Cina, Pemerintah Cina

juga memberlakukan beberapa kebijakan lain yang sama pentingnya.

Faktor Pendapat Negatif Publik dan Tuntutan Organisasi Internasional

Faktor pendapat negatif dari publik, serta adanya tuntutan dari organisasi internasional, termasuk ke dalam faktor penyebab Cina memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padat yang dipicu oleh faktor lingkungan dan kesehatan. Sejak 2007, Cina dinilai telah mengambil alih “peran” dari negara AS sebagai negara yang terkenal paling banyak menyumbang emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2014, Cina menyumbang sebesar 27% emisi gas rumah kaca ke atmosfer bumi yang kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 28,3% (Albert dan Xu, 2016). Atas identitasnya tersebut, Cina pun mendapatkan banyak kritik dari komunitas internasional dan juga kritik yang datang dari dalam negeri.

Greenpeace East Asia, menyatakan bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Cina menjalankan peringatan daruratnya yaitu “*Red Alerts*” untuk pertama kalinya karena polusi yang dinilai sangat parah. Banyak aktivitas penduduknya yang harus ditunda seperti beberapa sekolah yang diliburkan serta aktivitas konstruksi dan industri yang ditunda. Sekitar 80% dari 367 kota di Cina tidak dapat memenuhi standar nasional atas polusi dalam partikel kecil pada sembilan bulan pertama tahun 2015. Pada Desember 2015, *Asian Development Bank* pun memberikan bantuan sebesar \$300 juta dengan tujuan untuk membantu Cina dalam menyelesaikan masalah polusi udaranya.

Eleanor Albert dan Beina Xu pun menyatakan bahwa rakyat Cina telah sejak lama melakukan aksi protes terhadap Pemerintah Cina. Aksi-aksi tersebut banyak yang dimulai secara damai harus berakhir dengan kacau. Pada tahun 2013, aksi protes yang terjadi meningkat sebesar 31% menjadi sebanyak 712 kasus jika dibandingkan dengan jumlah aksi protes yang terjadi pada tahun 2012.

Media internet pun menjadi alat bagi para penduduknya dalam menyebarkan informasi mengenai kondisi lingkungan di Cina. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada publik atas kondisi sebenarnya dari lingkungan di Cina.

Chai Jing, pada tahun 2015, merilis sebuah film dokumenter berjudul “*Under The Dome*”. Film ini dibuat olehnya karena anaknya harus menderita tumor jinak saat masih di dalam rahimnya. Pembuatan film ini pun ditujukan untuk menyalahkan polusi udara sebagai penyebab anaknya harus menderita penyakit tersebut. Film dokumenter ini pun berisi wawancara-wawancara kecil yang dilakukannya kepada penduduk yang ada di Cina. Dalam beberapa wawancara, Chai Jing menanyakan apakah mereka pernah melihat bintang ataupun awan putih. Pertanyaan tersebut pun dijawab dengan kata tidak pernah. Film ini pun ditujukan untuk mengkritik Pemerintah Cina yang tidak menjalankan hukum negaranya dengan baik. Bahkan oleh pemerintah atau pejabat di level bawah, hukum tersebut cenderung diabaikan jika berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi (Hatton, 2015).

Selain film “*Under the Dome*”, ada film dokumenter lainnya seperti *Beijing Besieged by Waste* dan *Plastic China*. Kedua film tersebut dibuat oleh Wang Jiuliang dan masing-masing film tersebut dibuat setahun sebelum kebijakan OGF dan ONS diberlakukan. Film *Beijing Besieged by Waste*, memperlihatkan kota Beijing yang memiliki banyak TPA tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Sedangkan *Plastic China* memperlihatkan kehidupan dua keluarga yang bergantung pada aktivitas daur ulang limbah impor di kota Shandong. Kedua film ini pun terkenal di dunia internasional dan bahkan diberikan beberapa penghargaan serta masuk ke dalam beberapa festival film. Film dokumenter ini pun mendapatkan perhatian dari dunia sampai akhirnya harus dicabut oleh Pemerintah Cina. Pencabutan dilakukan karena dinilai memberikan tekanan politik kepada pihak

pemerintah yang tidak memberlakukan hukum sebagaimana mestinya serta menjelek-jelekkan identitas negara Cina (Schulz, 2019).

Seluruh tuntutan yang datang dari publik dalam negerinya pun tersebar luas melalui media internet dan mengekspos Cina ke dunia internasional. Media massa dari beberapa negara pun ikut memberitakan permasalahan ini. Baik itu mengenai aksi protes yang dilakukan penduduk Cina, ataupun mengenai film dokumenter yang mengekspos kondisi lingkungan di Cina.

Cina pun mulai mendapat tekanan dari dunia internasional. Saat negosiasi iklim internasional, Cina diminta untuk lebih serius dalam melawan perubahan iklim global. Terlebih lagi Cina yang identitasnya terkenal sebagai negara yang paling banyak menggunakan sumber energi dan juga penyumbang emisi gas rumah kaca khususnya karbondioksida ke atmosfer. Pemberian tekanan ini pun dikarenakan adanya kesepahaman bersama demi kepentingan negara Cina beserta komunitas internasional. Komunitas internasional pun memiliki kepentingan untuk tidak mendukung pertumbuhan ekonomi Cina secara terus menerus apabila kepentingan dari lingkungan serta penduduknya tidak lagi diperhatikan.

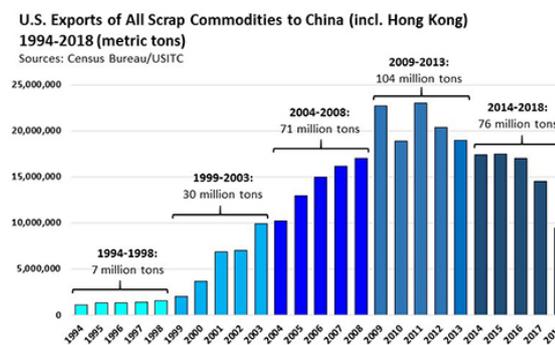
Erik Solheim, sebagai kepala dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) mengatakan bahwa sekarang ini dunia kita sedang dalam masa transisi dari penggunaan batu bara ke energi terbarukan. Solheim pun mengatakan “*China has a very big job ahead of it to transform fundamentally from coal into these very promising new technologies*” pernyataannya ini untuk mengingatkan Cina yang menutup diri dengan bergantung pada bahan bakar fosil yaitu batu bara sangatlah berbahaya karena risikonya yang tinggi terhadap lingkungan dan juga kesehatan.

Dampak Perumusan Kebijakan Larangan Impor Limbah Padat oleh Cina Terhadap Perekonomian

Setelah kebijakan larangan impor limbah padat diberlakukan oleh Cina, negara-negara yang biasa mengekspor dan bahkan negara Cina sendiri harus menerima dampak yang dihasilkan, khususnya dampak yang sifatnya negatif. Dalam artikel ini, dampak yang dibahas oleh penulis adalah dampaknya terhadap perekonomian, baik yang diterima oleh Cina, AS, maupun secara internasional.

Dampak Ekonomi antara Cina dan Amerika Serikat

Pada saat Cina memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padatnya, inspeksi ketat yang dilakukan bersama pihak bea cukai oleh Pemerintah Cina gencar dilakukan. Khususnya terhadap produk daur ulang berupa kertas dan plastik. Inspeksi ketat ini pun memperlambat proses di pelabuhan, sehingga kontainer-kontainer yang dibawa harus bertahan di pelabuhan sampai mendapat giliran untuk diperiksa pihak bea cukai. Hal ini pun menyebabkan pengekspor harus membayar biaya tambahan untuk kontainer yang harus menginap di pelabuhan. Setelah di periksa, jika ada kontainer yang tidak sesuai maka kontainer tersebut tidak akan diterima dan dikembalikan ke asalnya. Hal ini merugikan pengimpor atau pihak pembeli yang harus membayar biaya pengembalian tersebut.



Gambar 4.3 [https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-\\$20.3-billion](https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-$20.3-billion)

Atas adanya resiko kerugian tersebut, muncullah kesepahaman bersama antar pihak pembeli dan pengekspor untuk tidak melakukan kerja sama dagang terlebih

dahulu. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pihak pengeksport akan memperketat pemeriksaan kontainernya sebelum dikirimkan ke Cina. Namun kebijakan yang diberlakukan oleh Cina telah mengakibatkan harga produk daur ulang di AS yang menurun. Hal ini pun dipengaruhi oleh jumlah permintaan di Cina yang menurun.

Dua bulan pertama kebijakan OGF berlangsung, pengiriman limbah kertas menurun sebesar 18,4% jika dibandingkan dengan dua bulan periode yang sama pada tahun 2012. Cina yang menjadi pasar limbah padat utama AS mengalami penurunan permintaan sehingga suplai barang di AS terlampaui banyak. Beberapa perusahaan yang ada di AS lebih memilih untuk mencari pembeli secara domestik dibandingkan harus mengirimnya ke Cina. Sama seperti AS, pihak Cina pun juga memilih untuk tidak mengimpor terlebih dahulu karena adanya resiko yang tinggi harus mengembalikan kontainer-kontainer tersebut.

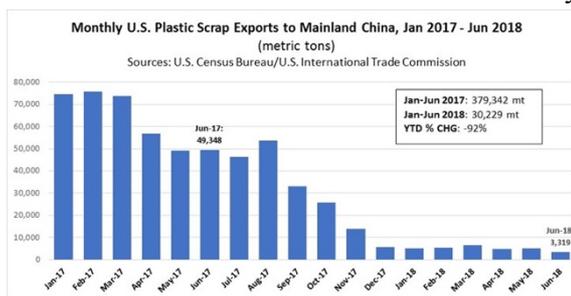
Inspeksi ketat pun tidak hanya dilakukan pada kebijakan OGF, namun juga saat kebijakan ONS berlangsung. Saat awal diterapkan, kebijakan ONS hanya menoleransi tingkat kontaminasi sebesar 1,5%. Namun pada Maret 2018, tingkat tersebut diperketat ke angka 0,5%. Angka ini pun dinilai sangat sulit untuk dipenuhi mengingat bahkan pada batasan 1,5% pun banyak pengiriman yang tidak lolos inspeksi (Parts, 2019).

Untuk bisa menyortir limbah hingga 99,5%, akan dibutuhkan teknologi canggih yang biayanya cukup tinggi. Maka dari itu, banyak perusahaan yang lebih memilih untuk mencari pasar baru. Namun jumlah limbah yang dieksport ke pasar baru tidak sebanding dengan jumlah limbah yang selama ini diterima oleh Cina.

Jika dilihat pada gambar 4.3, total limbah yang AS eksport ke wilayah Cina, sebanyak 104 juta metrik ton pada periode 2009-2013. Sedangkan sejak kebijakan OGF berlaku, angka tersebut menurun hingga total limbah yang AS kirimkan ke Cina pada

periode 2014-2018 sebanyak 76 juta metrik ton dengan penurunan drastis terjadi pada tahun 2017 ke 2018, sejak kebijakan kedua diberlakukan. Suplai limbah yang ada di AS, karena terlampaui banyak dengan permintaan yang sedikit menyebabkan turunnya harga limbah padat khususnya di AS. Gretchen Carey, sebagai pemimpin salah satu industri daur ulang yang ada di Massachusetts yaitu MassRecycle, mengatakan bahwa harga limbah kertas turun ke angka yang tidak lebih dari \$5 per tonnya. Sebelum kebijakan diberlakukan harga limbah kertas berkisar \$75 per tonnya (Gellerman, 2019).

Tidak hanya limbah kertas, namun jika dilihat pada gambar 4.4, limbah plastik pun ikut mengalami penurunan khususnya pada tahun 2018, setelah kebijakan ONS diberlakukan. Pada periode Januari-Juni 2017, total eksport limbah plastik adalah sebesar 379.342 metrik ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama yaitu Januari-Juni pada tahun 2018, total eksport limbah plastik hanya sebesar 30.229 metrik ton, sehingga penurunan yang terjadi adalah sebesar 92%. Penurunan ini pun memengaruhi nilai eksport AS ke Cina. Pada tahun 2018, nilai eksport limbah padat oleh AS ke Cina menurun sebesar \$2.2 milyar



Gambar 4.4 <https://www.globenewswire.com/news-release/2018/08/08/1549149/0/en/Recycling-Industry-Statement-on-China-s-Announcement-of-Tariffs-on-All-Scrap-Imports.html>

atau sebesar 38% dari tahun sebelumnya ke angka \$3.5 milyar.

Hal ini pun tidak hanya berdampak pada nilai eksport dan impor saja, namun cenderung juga berdampak pada perekonomian seluruh perusahaan atau industri yang terkait. Bisnis dalam bidang industri daur ulang ini dikenal sebagai usaha yang mengubah sampah

menjadi uang, namun sekarang bisnis-bisnis ini hanya Gambar 4.5 Sampah Plastik AS memiliki tumpukan sampah yang tak lagi



memiliki nilai.

Tiga pusat daur ulang dan dua fasilitas pemulihan yang ada di kota besar seperti Los Angeles telah tutup sejak tahun 2018. RePlanet, sebagai industri daur ulang terbesar di California, pada Agustus 2019 menutup seluruh 284 industrinya dan memberhentikan 750 tenaga kerjanya. Hal ini pun dipengaruhi oleh terus menyusutnya keuntungan yang membuat banyak industri daur ulang harus beroperasi dengan kerugian dan dengan adanya resiko harus menutup usahanya (Piper, 2019).

Tidak hanya di AS, meskipun Cina yang memberlakukan kebijakan ini, sebagai negara yang selama ini bergantung pada limbah impor pun juga mengalami kesulitan dalam menghadapi kebijakannya sendiri. Kebijakan ini menyebabkan kebanyakan perusahaan di Cina beralih ke limbah padat yang ada secara domestik. Namun limbah-limbah ini pun membutuhkan biaya yang besar dalam pengolahannya mengingat rendahnya kualitas dari limbah domestik.

Beberapa perusahaan di Cina, salah satunya Huizhou Qinchun menggunakan limbah daur ulang sebagai bahan utama produksinya. Pemiliknya, Zhang Jinglian mengatakan bahwa perusahaannya cenderung akan mengurangi jumlah produksinya hingga setidaknya sepertiga dari biasanya karena mahalnya bahan baku. Tidak hanya itu, perusahaannya pun telah memberhentikan dua belas pekerjanya dalam

rangka memotong pengeluaran dari perusahaan (Straits Time, 2018).

Dampak Perekonomian Secara Internasional

Dampak tidak hanya dirasakan oleh AS maupun Cina saja, namun dampak juga dirasakan oleh negara-negara lain khususnya yang berkaitan langsung dengan AS. Mengingat AS sebagai pengekspor utama cenderung memiliki kepentingan untuk mencari pasar baru. Pada artikel "*U.S Scrap Exports Up 13% in 2018 to \$20.3 Billion*" milik *Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI)* disebutkan bahwa negara-negara seperti India, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman menjadi lima negara utama yang menjadi pasar baru AS.

Pernyataan ini berdasarkan data perbandingan nilai ekspor AS dari tahun sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. India menerima ekspor dari AS yang meningkat sebesar \$586 juta ke angka \$1,5 milyar, terhadap Malaysia sebesar \$550 juta ke angka \$736 juta, Taiwan sebesar \$498 juta ke angka \$1,1 milyar, Korea Selatan sebesar \$465 juta ke angka \$1,2 milyar, dan Jerman sebesar \$319 juta ke angka \$1,2 milyar. Tidak hanya terhadap negara-negara tersebut, namun ada juga pasar besar lainnya seperti Inggris, Meksiko, Indonesia, Belgia, Jepang, Vietnam, Thailand, dan Bangladesh.

Untuk mendukung pernyataan tersebut, dapat dilihat melalui data pada gambar 4.5, bahwa ekspor limbah plastik dibandingkan enam bulan pertama pada tahun 2017 dan 2018 sangat jauh berbeda di beberapa negara.

Pada gambar, terlihat data bahwa di negara Malaysia, peningkatan ekspor limbah plastik yang dilakukan oleh AS meningkat lebih dari tiga kali lipat. Bahkan di Thailand peningkatannya lebih dari dua puluh kali lipat. Selain kedua negara ini, negara-negara lain seperti Vietnam, Korea Selatan, Turki, dan bahkan Indonesia juga mengalami peningkatan yang dinilai cukup signifikan.

Hal ini pun menjadi bukti pengalihan ekspor yang dilakukan oleh AS ke negara-negara lain khususnya negara di Kawasan Asia. Namun, negara-negara di Kawasan Asia tidak hanya menerima pengalihan ekspor dari AS saja. Negara-negara yang tidak lagi bisa mengirim limbah ke Cina pun juga harus mencari pasar baru.

Sun dan Phoonphongphiphat dalam artikel miliknya di *Nikkei Asian Review* mengutip data milik *Global Trade Atlas* yang menyatakan bahwa pada tahun 2018, dari bulan Januari hingga Maret, Thailand telah mengimpor limbah padat dari Jepang, AS, dan juga Uni Eropa sebesar 121.000 ton. Jumlah ini jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, maka telah meningkat sebesar 17,7 kali, dan sedangkan pada Malaysia meningkat empat kali lipat (Sun dan Phoonphongphiphat, 2018).

Namun, sebagai tindakan preventif, negara-negara di Asia sudah mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti pemberhentian impor limbah padat, pencabutan izin melakukan impor, dan bahkan mengikuti kebijakan Cina yaitu membatasi masuknya limbah asing ke negaranya masing-masing.

Meskipun kebijakan tersebut dapat menjadi penghambat atas potensi masuknya investasi asing, tindakan ini merupakan tindakan pencegahan dari negara yang mementingkan kondisi lingkungan hidup dibandingkan adanya potensi pertumbuhan perekonomian bagi negaranya.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur ke-14 tahun 2019 di Bangkok, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia menolak pengiriman limbah yang bersifat beracun dan berbahaya. Tidak hanya Indonesia, Presiden Filipina, Duterte pun juga memiliki pemahaman bersama dengan Presiden Jokowi (Septiasputri, 2019). Negara-negara ini pun juga merupakan anggota dari Perjanjian Paris dan Konvensi Basel yang memperjelas identitas masing-masing negara untuk lebih mementingkan kondisi lingkungannya. Sekaligus mencari

solusi untuk mengurangi pencemaran yang ada, sehingga bukan untuk memperburuk kondisi lingkungan yang sudah terjadi.

Hal ini berbeda dengan negara-negara maju yang mengalihkan limbahnya tanpa mementingkan lingkungan hidup negara lain. Kaum Konstruktivis pun melihat hal ini dikarenakan negara-negara seperti AS, Kanada, Australia, dan Jepang yang tidak meratifikasi Konvensi Basel. Serta AS yang juga mengundurkan dirinya dari Perjanjian Paris, sehingga negara-negara ini cenderung tidak memiliki rasa bertanggung jawab atau berkewajiban dalam menjalani ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, ada beberapa hal menarik yang menurut penulis penting untuk dibahas khususnya dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah. Kesimpulan yang dapat ditarik pada artikel ini adalah, kebijakan larangan impor limbah padat oleh Cina diberlakukan karena adanya pemahaman baru di dalam negara Cina bahwa identitas negaranya di bidang lingkungan lebih penting, jika dibandingkan dengan adanya kepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya sementara dan dapat memberikan dampak negatif pada negaranya.

Cina yang identitasnya terkenal sebagai negara dengan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas industri khususnya industri daur ulang memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padat dengan upaya untuk memperbaiki identitasnya dari "*Plastic China*" kembali menjadi "*Beautiful China*". Munculnya kepentingan ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang berkaitan satu sama lainnya. Dari adanya faktor lingkungan yaitu beberapa pencemaran di udara, air, dan tanah di Cina, yang menyebabkan munculnya faktor kesehatan di mana banyak sekali penyakit dan bahkan kematian yang disebabkan oleh tereksposnya manusia terhadap pencemaran

tersebut. Faktor-faktor ini pun mengakibatkan munculnya faktor lain yaitu faktor adanya pandangan negatif publik yang datang dari dalam negeri Cina sendiri khususnya terhadap Pemerintah Cina yang dinilai tidak menjalankan hukum dengan semestinya. Adanya kesepakatan bersama di mata internasional pun menyebabkan munculnya faktor tuntutan yang datang dari dunia internasional khususnya organisasi internasional.

Setelah diberlakukan, kebijakan ini memberikan dampak terhadap perekonomian banyak pihak. Khususnya kepada Cina yang selama ini bergantung kepada limbah padat impor, serta AS yang juga bergantung kepada Cina dalam mengirimkan limbahnya. Kebijakan yang memengaruhi jumlah permintaan dan penawaran limbah padat ini pun berdampak pada perekonomian. Industri-industri yang berkaitan khususnya yang ada di AS dan Cina secara terpaksa harus menutup usahanya ataupun mengurangi jumlah pekerjanya.

Namun dampak tidak hanya diterima oleh Cina maupun AS saja. Negara-negara lain pun juga terkena dampak dari kebijakan ini. Seperti negara lain lain yang juga mengirimkan limbahnya ke Cina. Negara-negara yang sudah tidak bisa mengirimkan limbahnya ke Cina pun cenderung harus mencari pasar baru sebagai pengganti Cina. Hal ini dinilai lebih efisien dibandingkan harus membuat infrastruktur atau fasilitas baru dalam mengolah limbah.

Negara-negara lain khususnya yang berada di Kawasan Asia seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia pun mendapatkan pengalihan limbah padat dari negara-negara yang terkena dampak dari kebijakan larangan impor limbah padat oleh Cina, khususnya AS. Pengalihan ini pun sebagai kepentingan dari negara-negara pengirim limbah dalam rangka untuk mempertahankan identitasnya sebagai negara maju yang bersih dari limbah. Namun negara-negara yang mendapatkan pengalihan limbah memiliki pemahaman bersama bahwa kondisi lingkungan di

masing-masing negaranya lebih penting dibandingkan adanya potensi pertumbuhan ekonomi. Negara-negara ini pun memilih untuk memberlakukan kebijakan seperti mencabut izin pengimporan limbah padat, menunda pembuatan lisensi, dan bahkan mengikuti jejak Cina dengan memberlakukan kebijakan larangan impor limbah pada

References

- Albert, E., & Xu, B. (2016, January 18). China's environmental crisis. Council on Foreign Relations. Retrieved from <https://www.cfr.org/backgroundunder/chinas-environmental-crisis>
- Basel Convention. (N.d.). Basel convention controlling transboundary movements of hazardous wastes and their disposal. Basel Convention Online. Retrieved from <http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/TradeandEnvironment/CaseLaw/tabid/3511/Default.aspx>
- Carpenter, M. (2018, August 8). Recycling industry statement on China's announcement of tariffs on all scrap imports. Globe News Wire Online. Retrieved from <https://www.globenewswire.com/news-release/2018/08/08/1549149/0/en/Recycling-Industry-Statement-on-China-s-Announcement-of-Tariffs-on-All-Scrap-Imports.html>
- Christou, L. (2018, April 18). The Yangtze deposits 55% of all river marine plastic pollution-but China is finally taking action. Verdict Online. Retrieved from <https://www.verdict.co.uk/yangtze-river-plastic-pollution/>
- Drezner, D. W. (2000). Bargaining, enforcement, and multilateral sanctions: When is cooperation counterproductive? *International Organization*, 54(1), 73-102. <https://doi.org/10.1162/002081800551127>
- Earley, K. (2013, August 27). Could China's 'green fence' prompt a global recycling innovation? Guardian Online. Retrieved from <https://www.theguardian.com/sustainable-business/china-green-fence-global-recycling-innovation>
- Edwards, L. (2016). E-waste recycling: The dirty trade between the United States and China. Senior Theses, Pomona College. Retrieved from https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1155&context=pomona_theses
- Flower, W. (2016). What operation Green Fence has meant for recycling. Retrieved from <https://www.waste360.com/business/what-operation-green-fence-has-meant-recycling>
- Gellerman, B. (2019, March 19). How a new policy in China has led to a recycling crisis in mass. WBUR Online. Retrieved from <https://www.wbur.org/earthwhile/2019/03/19/recycling-massachusetts-china-effect>
- Hatton, C. (2015, March 2). Under the dome: The smog film taking China by storm. BBC News Online. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-31689232>
- Hervey, G. (2019, September 17). Countries ratify ban on global exports of hazardous waste. Chemical Watch Online. Retrieved from <https://chemicalwatch.com/82197/countries-ratify-ban-on-global-exports-of-hazardous-waste>
- High, V. E. (2018). Top 10 charts of 2018. Energy Policy Institute at the University of Chicago. Retrieved from <https://epic.uchicago.edu/news/top-10-charts-of-2018/>
- Indonesian Foreign Ministry. (2007). *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, (5th ed.). Jakarta, Indonesia: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri.
- Institute of Scrap Recycling Industries. (2019, 15 March). US scrap exports Up 13% in 2018 to \$20.3 billion. ISRI. Retrieved from [https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-\\$20.3-billion](https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-$20.3-billion)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2019). Sanksi. KBBI Online. Retrieved from <https://kbbi.web.id/sanksi>
- Karlsen, O. T. (2019). Values of waste: A meta-ethnography of China's informal recycling sector. Master's Thesis, Department of Culture Studies and Oriental Language, The University of Oslo. Retrieved from https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70119/1/Karlsen_Master_Values-of-Waste.pdf
- Li, C., & Jianqing, C. (2019). The significance of restrictions on waste import in producing green development in China. *American Journal of Environmental Protection*, 8(1), 5-16. <https://doi.org/10.11648/j.ajep.20190801.12>
- McCarthy, N. (2015). Air pollution Chinese and American cities in comparison (Infographic). *Forbes Online*. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/01/23/air-pollution-chinese-and-american-cities-in-comparison-infographic/#6f84ba1d2362>
- McCarthy, N. (2018, April 18). Air pollution contributed to more than 6 million deaths in 2016 (Infographic). *Forbes Online*. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2018/04/18/air-pollution-contributed-to-more-than-6-million-deaths-in-2016-infographic/#39ed258813b4>
- McCarthy, N. (2019). The countries polluting the oceans the most. *Statista Online*. Retrieved from <https://www.statista.com/chart/12211/the-countries-polluting-the-oceans-the-most/>
- McDaniel, P. (2019, August 13). As California's recycling industry struggles, companies and consumers are forced to adapt. *Los Angeles Times Online*. Retrieved from <https://www.latimes.com/environment/story/2019-08-13/california-recycling-industry-plastics-china>
- Mohan, G. (2015, February 13). Millions of tons of trash dumped into world's oceans. *Los Angeles Times Online*. Retrieved from <https://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-tons-of-plastic-trash-in-oceans-20150213-story.html>
- NDTV. (2017, August 9). United Nations environment programme chief urges China to do more on climate. *NDTV Online*. Retrieved from <https://www.ndtv.com/world-news/united-nations-environment-programme-chief-urges-china-to-do-more-on-climate-1735504>
- Parts, C. (2019). Waste not want not: Chinese recyclable waste restrictions, their global impact, and potential U.S. responses. *Chicago Journal of International Law*, 20(1), Art. 8. Retrieved from <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol20/iss1/8>
- Purwaningrum, A. (2018, June 23). Gawat China lakukan hal ini, bumi akan dibanjiri 111 juta ton sampah pada 2030 mendatang. *Bangka Pos Online*. Retrieved from <http://bangka.tribunnews.com/amp/2018/06/23/gawat-china-lakukan-hal-ini-bumi-akan-dibanjiri-111-juta-ton-sampah-pada-2030-mendatang>
- Resource Recycling. (2018). From Green Fence to red alert: A China timeline. *Resource Recycling Online*. Retrieved from <https://resource-recycling.com/recycling/2018/02/13/green-fence-red-alert-china-timeline/>
- Richter, F. (2019, March 1). China won't accept U.S. plastic waste. Now what?. *Statista Online*. Retrieved from <https://www.statista.com/chart/17220/plastic-waste-united-states/>
- Rinkesh. (2020). What is waste management? *Conserve Energy Future Online*. Retrieved from <https://www.conserve-energy-future.com/waste-management-and-waste-disposal-methods.php>

- Sanubari, D. R. (2019). Respon Amerika Serikat terhadap kebijakan larangan impor sampah daur ulang Tiongkok. Skripsi, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. Retrieved from http://repository.unair.ac.id/87586/5/JURNAL%20SKRIPSI_DIMAS%20RAHMAD%20SANUBARI_0711233043.pdf
- Sebayang, R. (2018, April 17). China berhenti jadi penampung sampah, dunia kebingungan. CNBC Indonesia Online. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180417142645-4-11310/china-berhenti-jadi-penampung-sampah-dunia-kebingungan>
- Schulz, Y. (2019). Plastic China: Beyond waste imports. Made in China Yearbook. <https://doi.org/10.22459/MIC.04.2019.48>
- Septiasputri, M. D. (2019, November 5). Di KTT ASEAN, Jokowi tolak pengiriman limbah B3. Radio Republik Indonesia Online. Retrieved from http://rri.co.id/post/berita/742916/internasional/di_ktt_asean_jokowi_tolak_pengiriman_limbah_b3.html
- Smeets, M. (2018, March 15). Can economic sanctions be effective?. Economic Research and Statistics Division World Trade Organizations Online. Retrieved from https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201803_e.pdf
- Soil Science Society of America. (2020). Soil contaminants. Soil Science Society of America Online. Retrieved from <https://www.soils.org/discover-soils/soils-in-the-city/soil-contaminants>
- Straits Times. (2018, January 21). China's waste import ban upends global recycling industry. Straits Times. Retrieved from <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-waste-import-ban-upends-global-recycling-industry>
- Sun, N., & Phoonphongphiphat, A. (2018, June 26). China's scrap plastic ban saddles neighbors with piles of problems. Nikkei Asian Review Online. Retrieved from <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/China-s-scrap-plastic-ban-saddles-neighbors-with-piles-of-problems>
- Takahashi, G. (2016). Damage and heavy metal pollution in China's farmland: Reality and solutions. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 5(1), 11-25. <https://doi.org/10.1080/24761028.2016.11869089>
- United States Environmental Protection Agency. (N.d.). Report on the environment: Municipal solid waste. UNEP. Retrieved from <https://www.epa.gov/roe/>
- Velis, C. (2014). International solid waste association. *Global Recycling Markets: Plastic Waste*, 41.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). *International relations theory*, (5th ed.). Boston, MA: Longman. Retrieved from [https://hostnezt.com/cssfiles/internationalrelations/International%20Relations%20Theory%20\(5th%20Edition\)%20Paul%20R.%20Viotti,%20Mark%20V.%20Kauppi.pdf](https://hostnezt.com/cssfiles/internationalrelations/International%20Relations%20Theory%20(5th%20Edition)%20Paul%20R.%20Viotti,%20Mark%20V.%20Kauppi.pdf)
- Wong, E. (2018, July 19). China is a climate leader but still isn't doing enough on emissions. *New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2018/07/19/world/asia/china-climate-change-report.html>
- World Bank. (2016, February 29). China: Keeping the water and environment clean in the Qiantang River Basin. World Bank Online. Retrieved

- from <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/29/china-keeping-water-and-environment-clean-in-qiangtang-river-basin>
- World Health Organization. (2018, May 2). Air pollution. WHO Online. Retrieved from [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- Xinhua. (2018, March 26). China defends foreign waste import ban. China Daily. Retrieved from <http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/26/WS5ab8f8bba3105cdcf6514617.html>
- Xinhua. (2013, May 24). President Xi pledges not to sacrifice environment. China Daily USA Online. Retrieved from http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-05/24/content_16530257.htm
- Yang, H., Ma, M., Thompson, J. R., & Flower, R. J. (2018). Waste management, informal recycling, environmental pollution and public health. *Journal of Epidemiology and Community Health* 72(3), 237-243. <https://dx.doi.org/10.1136/jech2016208597>
- Yang, W. (2008). Regulating electrical and electronic wastes in China. *Review of European Community and International Environmental Law*, 17(3), 335-344. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2008.00608.x>
- Xia, Y. (2019). China's environmental campaign: How China's "war in pollution" is transforming the international trade in waste. *New York University Journal of International Law and Politics*, 51, 1101-1178. Retrieved from <http://nyujilp.org/wp-content/uploads/2019/09/NYI402.pdf>
- Zhou, M., et. al. (2019) Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: A systematic analysis for the global burden of disease study 2017. *The Lancet*, 394, 1145-1158. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30427-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30427-1)